KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALLAUDDIN
MAKASSAR

Nurul Lailatul Syakilah Soflestuny

9050012092

Email : Syakilahnurul3@gmail.com

ABSTRACT

Economic development is generally inseparable from legal development, therefore legal development policies are implemented based on economic development, namely with a balance of laws and regulations that support economic activities in the era of free trade without harming national interests. Normatively, Law Number 40 of 2007 regulates Limited Liability Companies, as stated in Article 1 point 1 of the Company Law, it is determined that a limited liability company is a "legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement to carry out business activities on a capital basis which is entirely divided into shares and shares. meet the requirements set by the law and its implementing regulations." When a PT is a legal entity, that's when the law treats shareholders and management is separate from the PT itself.

Keywords: Legal Entity, Agreement, Shareholders

Abstrak

Pembangunan ekonomi umumnya tidak terpisahkan dari pembangunan hukum, oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum dilaksanakan berdasarkan pembangunan ekonomi yaitu dengan adanya keseimbangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi di zaman perdagangan yang bebas dengan tidak merugikan kepentingan nasional. Secara normative Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang Perseroan Terbatas, tertuang dalam pasal 1 angka 1 UUPT tersebut ditentukan bahwa perseroan terbatas, adalah "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha

dengan dasar modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya”. Saat sebuah PT berstatus sebagai badan hukum maka saat itulah hukum tersebut memperlakukan para pemegang saham dan pengurusan terpisah dari PT itu sendiri

Kata Kunci : Badan Hukum, Perjanjian, Pemegang Saham.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di era globalisasi ini untuk masa sekarang dan untuk dimasa yang akan datang, demi memperoleh kesejahteraan masyarakat banyak pengusaha yang memiliki usaha tumbuh dengan pesat. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini telah ditegaskan pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa : Perekonomian Nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah dan kecil dalam pola kemitraan.

Perseroan Terbatas memiliki pengertian suatu perusahaan berbentuk dalam badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih atas perjanjian oleh para pendirinya demi melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya tercantum dalam saham dan memenuhi persyaratan didalam peraturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹ Dalam pembentukan perusahaan telah diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang (Aulia, 2021) Perseroan terbatas atau yang disingkat sebagai UUP.

Setiap perubahan dan penggantian undang-undang tersebut selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹ membawa semangat baru dan norma baru. Seperti, mengenai perlunya kepedulian sosial perseroan tidak hanya kepada pemegang saham (shareholder), namun juga pemangku kepentingan (stake holder) yang lebih luas lagi, sehingga memunculkan adanya regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-

saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

Menurut Pasal 1 UUPT No.40 Tahun 2007 pengertian PT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. (BARKATULLAH, 2021)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini serta pelaksanaannya. Untuk menjadi badan hukum, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan tatacara pengesahan Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama Perseroan Terbatas yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri. Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham, dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam (Herlina, 2021) perseroan (limited liability).

seperti juga tergambar dalam definisi-definisi berubah-ubah seperti diatas, maka menurut hemat peneliti, setidaknya-tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas berubah-ubah.. Ke 15 (lima belas) elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dasarnya perjanjian;
- b. Adanya parapendiri;
- c. Pendiri atau pemegang saham bernaung dibawah suatu nama bersama;
- d. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham;
- e. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual;
- f. Diciptakan oleh hukum;
- g. Mempunyai kegiatan usaha;
- h. Berwenang melakukan kegiatan usahanya sendiri
- i. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

- j. Adanya modal dasar;
- k. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti;
- l. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang asset-asetnya;
- m. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan;
- n. Mempunyai organ perseroan.

Tata cara dan syarat pendirian sebuah perseroan terbatas sebagai berikut:

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat pendirian, hal ini tidak berlaku dalam rangka peleburan perseroan.
3. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahaan badan hukum perseroan.
4. Setelah berstatus badan hukum, dikemudian hari jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka setelah jangka waktu enam bulan sejak kejadian dimaksud pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan menerbitkan saham baru kepada orang lain.
5. Jika telah melewati jangka waktu enam bulan pemegang saham tetap kurang dari dua orang, maka pemegang saham bertanggungjawab atas segala perikatan yang ada dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan yang mengharuskan sebuah perseroan didirikan oleh dua orang lebih tidak berlaku bagi perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseoran yang mengelola bursa efek, kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam (anggoro, 2021) Undang-Undang tentang pasar modal.

*Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum yang Terpisah
(Separate Legal Personality)

Menurut Hansmann dan Kraakman, hal yang sangat sentral dalam mendefinisikan korporasi dan membedakan dengan bentuk organisasi yang lain adalah prinsip *separate legal personality* dan *limited liability*.⁵⁰ Terhitung sejak memperoleh status badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari perseroan itu sendiri, yaitu sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri.⁵¹ Menurut Ross Grantham, konsekuensi dari *corporate personality* tersebut adalah diakuinya untuk tujuan hukum, korporasi sebagai pengembal hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki individu yang mendapatkan keuntungan dari bisnis korporasi tersebut.

Konsep *legal personality* ini pertama kali berasal dari *case Salomon v. A Salomon & Co. Ltd*, yang menyebutkan bahwa entitas hukum bukan manusia telah ada sejak jaman Romawi. Kaitannya dengan *limited liability*, menurut Pettet, pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap aset perusahaan melebihi saham yang mereka miliki.

Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan dilandaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembangunan ekonomi pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum diselenggarakan dengan pembangunan ekonomi yaitu dengan adanya keseimbangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi di zaman perdagangan yang bebas dengan tidak merugikan kepentingan nasional. Perseroan Terbatas merupakan salah satu perusahaan yang diharapkan dapat menjadi sarana dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi.

Lebih dipilihnya Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan dibandingkan bentuk yang lain dikarenakan oleh dua hal yaitu: pertama, Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan kedua, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mandiri, dimana sebagai asosiasi modal maka akan mempermudah

pemegang saham perseroan terbatas untuk menyerahkan sahamnya kepada orang lain, disamping itu sebagai badan hukum yang mandiri menurut UUPT maka pertanggung jawaban pemegang saham bersifat terbatas. Sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki karakteristik antara lain: adanya organisasi yang teratur, mempunyai/adanya harta kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan sendiri (Putrawan, 2021) dan kepentingan sendiri.

Pemegang saham berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan di dalam perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pemilik atau pendirinya.

Berdirinya PT merupakan hasil dari kesepakatan para pendirinya untuk mengadakan dan mengikat diri ke dalam suatu perjanjian untuk mendirikan PT. Para pendiri PT dapat berupa perorangan, yaitu warga negara Indonesia (WNI) maupun WNA serta badan hukum, yaitu badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Pendirian PT merupakan persekutuan modal yang diambil bagian oleh para pendiri dan/atau pemegang saham perseroan, sehingga harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata bab kedua bagian kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian, khususnya Pasal 1313-1319, bagian kedua tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, khususnya Pasal 1320-1337, dan bagian ketiga tentang Akibat dari Perjanjian, yaitu Pasal 1338-1341.

Agar pendirian PT sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. harus terdapat kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. adanya suatu kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. adanya suatu hal tertentu; dan
4. adanya suatu sebab yang halal.

Jika seluruh persyaratan sahnya perjanjian telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian untuk mendirikan perseroan tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya.

Pasal 7 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan demikian, jika syarat yang ditetapkan ini tidak dipenuhi, eksistensi suatu PT tidak pernah ada.

1) Pemegang Saham PT. Agar badan hukum dapat berhubungan didalam pergaulan hukum seperti membuat suatu perjanjian ataupun melakukan kegiatan usaha pastinya memerlukan modal. Modal yang dimaksud disini itu dari kekayaan pendiri yang dipisahkan kemudian modal awal tersebut menjadi kekayaan milik badan hukum berbeda dengan kekayaan pendiri. Setelah PT statusnya sudah sebagai badan hukum maka apabila terjadi kerugian perseroan tersebut melebihi nilai saham yang telah diambil pemegang saham tidak bertanggung jawab. Terpisahnya kekayaan PT dengan harta kekayaan yang dimiliki pemegang saham secara pribadi dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT bahwa "Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki". Keputusan yang sudah diatur pada pasal ini memperjelas dan menekankan apa yang menjadi identitas dari PT, di mana pemegang saham cukup bertanggung jawab sebatas setoran atas semua saham yang ia miliki dan harta kekayaannya tidak termasuk. Dengan begitu pula dapatlah kita simpulkan bahwa: a. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas hutang dari perseroan tersebut dan sebaliknya, b. Harga saham yang diinvestasikan oleh pemegang saham apabila terjadi kerugian maka hanya sebatas harga saham tersebut, c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih lanjut terkait atas aset pribadinya kepada kreditor perseroan.

Dengan begitu, didalam perseroan tanggung jawab dari pemegang saham hanya terbatas. Pemegang saham pastinya tidak akan memikul kerugian hutang PT lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanam dalam PT tersebut dan tanggung jawab dari PT tersebut justru tidaklah terbatas. Apabila terjadinya suatu utang ataupun kerugian didalam PT maka hutang dan kerugian tersebut semata-mata hanya akan dibayar secukupnya dari harya kekayaan yang ada didalam PT tersebut. Jadi, dari keputusan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT itu kita dapat ketahui bahwasannya tanggung jawab dari pemegang saham yang sifatnya terbatas di dalam PT sebagai badan hukum bisa saja tidak berbuat lagi dan bahkan bisa tidak terbatas lagi apabila pemegang saham melakukan sesuatu hal yang sudah tercantum. Nah, biasanya hal ini terjadi dikarenakan itikad buruk (bad faith) dari si pemegang saham yang memperlalat atau memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Atau bisa saja pemegang saham bertindak sebagai borgtoch kepada kreditor atau hutang yang dimiliki perseroan.

2) Pendiri PT. PT yang sudah menjadi status badan hukum ini ternyata memiliki dampak kepada terbatasnya pertanggungjawaban dari pendiri -- pendiri PT. Kita kaitkan dengan ketentuan yang ada di Pasal 11 UUPA yang mengataur bahwa jika PT sudah memiliki status badan hukum dengan itu pula memungkinkan apa yang bisa saja terjadi untuk perbuatan hukum di mana pelakunya yaitu si pendiri -- pendiri PT. Nah, perbuatan hukum ini mungkin saja terjadi di mana ketika PT belum disahkan untuk menjadi badan hukum. Ada juga beberapa syarat diantaranya :

- PT dengan tegas dan jelas mengatakan bahwasanya menerima seluruh perjanjian yang sudah dibuat pendiri PT.

- PT juga mengatakan dengan tegas untuk turun tangan atau memegang alih seluruh hak serta kewajiban yang kiranya muncul dari perjanjian yang sudah dibuat oleh pendiri, bahkan jika perjanjiannya tidak diatasnamakan PT tersebut.

- PT mengukuhkan atau mempertegas dengan tertulis segala perbuatan hukum itu dilakukan dengan diatasnamakan PT itu.

Berikutnya kemungkinan yang ke dua, bahwa perbuatan -- perbuatan hukum itu ditolak dan tidak dapat diambil alih atau bahkan tidak juga dapat dikukuhkan oleh PT. Sebab para pendiri PT masing -- masing yang telah melanggar perbuatan hukum bisa saja memiliki tanggung jawab miliknya pribadi atas seluruh dampak yang muncul dari perbuatan hukum itu. Pertanggungjawaban dari Si Pendiri PT ke PT itu merupakan tanggung jawabnya secara pribadi apabila perbuatan yang kedua ini merupakan kemungkinan yang akan terjadi.

Eksistensi perusahaan menjadi salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara karena dengan adanya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan ini maka kebutuhan masyarakat akan dapat terpenuhi, aktivitas masyarakat di bidang ekonomi pun dapat berjalan, termasuk adanya penyerapan tenaga kerja melalui perusahaan tersebut. Keberadaan suatu perusahaan yang aktif menjalankan usaha sangatlah penting, mengingat keberadaan perusahaan berpengaruh pada tingkat perekonomian Negara

Tiap-tiap perusahaan tersebut melakukan suatu kegiatan usaha untuk menghidupkan dan menjaga keeksistensian perusahaannya, kegiatan ini disebut sebagai kegiatan usaha perusahaan. Kegiatan usaha perusahaan adalah setiap tindakan, perbuatan, atau pengusaha dengan 3 tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹ Keuntungan yang didapat ini harus diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti keuntungan tersebut bukan diperoleh secara melawan hukum, misalnya karena penyelundupan, persaingan tidak sehat, pemerasan jasa karyawan, dan pajak yang tidak dibayarkan kepada pemerintah.

Perusahaan di dalam lapangan ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai suatu badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh Negara, yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero). Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta.

Badan usaha berbentuk perseroan terbatas ialah suatu bentuk usaha yang di tahun-tahun terakhir ini banyak dipakai oleh para pedagang, pengusaha, dan sebagainya, untuk mencapai maksud dan tujuannya dalam lapangan industri, perdagangan, dan sebagainya. Karena tujuan utama dari pendirian perseroan terbatas adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya

Daftar Pustaka

anggoro, t. (2021). perseroan terbatas sebagai subyek hukum. *ekonimi syariah*, 1, 200-221.

Aulia, M. T. (2021). perseroan terbatas. *hukum perseroan*, 1(2), 100-150.

BARKATULLAH, A. H. (2021). undang undang perseroan. *jurnal ekonomi syariah*, 1(2), 110-130.

Herlina, N. (2021). perdata perseroan terbatas. *ekonomi syariah*, 1(2), 188-190.

Putrawan, S. (2021). hukum perseroan terbatas. *ekonomi syariah*, 1(2), 50-70.